



BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEMENDIKDAS

#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDAS  
RAMAH

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

## BPMP Provinsi Sumatera Utara





## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun selaras dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Melalui Renstra 2025–2029 ini, BPMP Provinsi Sumatera Utara bertekad menjadi garda terdepan dalam penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan strategis, sasaran, indikator kinerja, serta strategi implementasi yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, dinas pendidikan, lembaga pendidikan, maupun mitra pembangunan. Semoga Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 30 Oktober 2025





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<i>i</i>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<i>ii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN .....</b>	<b>22</b>
2.1 Visi dan Misi	23
2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan	24
2.3 Sasaran Kegiatan	25
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PAUD Dasmen	31
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara	35
3.4 Kerangka Regulasi	38
3.5 Kerangka Kelembagaan	39
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Target Kinerja	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR TABEL

TABEL 1: CAPAIAN KINERJA BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2021	4
TABEL 2: CAPAIAN KINERJA BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 – 2024	5
TABEL 3: TREND ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020-2024	6
TABEL 4: DATA JUMLAH SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA	17
TABEL 5: TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	25
TABEL 6: TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	26
TABEL 7: SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	26
TABEL 8: TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	27
TABEL 9: SASARAN STRATEGIS BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA DAN INDIKASI RISIKO	28
TABEL 10: SASARAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PRIORITAS NASIONAL 4	34
TABEL 11: STRATEGI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PAUD DASMEN	40
TABEL 12: SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA	48
TABEL 13: PROGRAM DAN KEGIATAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	49
TABEL 14: INDIKATOR DAN RINCIAN OUTPUT	51
TABEL 15: INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA 2025 – 2029	53



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1:	TREN ANGGARAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2024	7
GAMBAR 2:	TREN PREDIKAT SAKIP BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2021	8
GAMBAR 3:	TREN NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020 – 2024	8
GAMBAR 4:	INOVASI "JADI BERNAS"	11
GAMBAR 5:	PENERIMAAN PENGHARGAAN KPPN MEDAN I AWARD SEBAGAI PERINGKAT II DALAM SATUAN KERJA TERBAIK KATEGORI PENYELESAIAN REKON DAN PENERBITAN SHR TAHUN 2024	13
GAMBAR 6:	PIAGAM PENGHARGAAN KPPN MEDAN I AWARD (30 JULI 2024)	13
GAMBAR 7:	PEMBERIAN PENGHARGAAN KPPN I MEDAN SEBAGAI PERINGKAT KEDUA PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT APLIKASI SAKTI PERIODE DESEMBER TAHUN 2024	14
GAMBAR 8:	PIAGAM PENGHARGAAN KPPN I MEDAN SEBAGAI PERINGKAT KEDUA PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT APLIKASI SAKTI PERIODE DESEMBER TAHUN 2024	14
GAMBAR 9:	LUAS WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA	16
GAMBAR 10:	DATA JUMLAH PEGAWAI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	19
GAMBAR 11:	RUANGAN PELAYANAN PUBLIK	20
GAMBAR 12:	STRUKTUR ORGANISASI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	45
GAMBAR 13:	DATA JUMLAH PEGAWAI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	46



# BAB I : PENDAHULUAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

BPMP Provinsi Sumatera Utara berkomitmen dan mendukung upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berkakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara periode 2025 – 2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PAUD Dasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2025 - 2029 yang berpedoman kepada teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10



Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara memuat rumusan sasaran program dan kegiatan dengan mengacu kepada kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan Rencana Strategis Ditjen PAUD Dasmen sebagai payung bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan dalam menyusun strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh - sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

## **1.1 Kondisi Umum**

### **1.1.1 Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024**

Pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan Rapor Mutu pada periode tahun 2020-2021 dan berdasarkan Rapor Pendidikan Kab/Kota yang merupakan hasil Asesmen Nasional (AN) satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2022 – 2024. Hasil analisis Asesmen Nasional melalui data rapor pendidikan telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :



Tabel 1 Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	26.5	24.3	27.4	38.06
[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	3.4	5	4.4
[IKK 1.3] Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	97.49	95.2	100

*Sumber : Rapor Mutu Tahun 2020 – 2021*

Pada tabel 1 Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara pada periode target Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2021 menunjukkan data sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 dengan menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari Aplikasi PMP dengan cara menetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 75. Hasil capaian menunjukkan bahwa persentase rata-rata kinerja sekolah di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 sebesar 24,3% meningkat pada Tahun 2021 menjadi 38,06%.

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk menunjukkan penurunan dengan asumsi semakin kecil persentase kesenjangan maka semakin baik mutu pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 terjadi penurunan yaitu dari kesenjangan sebesar 3,4% di Tahun 2020 kemudian menurun menjadi 4,4% pada Tahun 2021.



Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan menunjukkan persentase jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki rapor dapodik (data pokok pendidikan) yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan pada Tahun 2020 sebanyak 97,49% yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 100%.

Tabel 2 Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>						
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	2.12	1.98	1.36	3.92	7.40
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	97.1	30	52.94	52.95	100

Sumber : Rapor Pendidikan Tahun 2022 - 2024

Pada tabel 2 Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 - 2024 menunjukkan data sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran dihitung berdasarkan persentase dari satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS di Provinsi Sumatera Utara yang meningkat nilai akreditasinya pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan PAUD dan Dikmas yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sumber data berdasarkan hasil akreditasi BAN PAUD menunjukkan bahwa persentase pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya pada periode akhir Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 7,40% .

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) menunjukkan bahwa Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) di Provinsi Sumatera

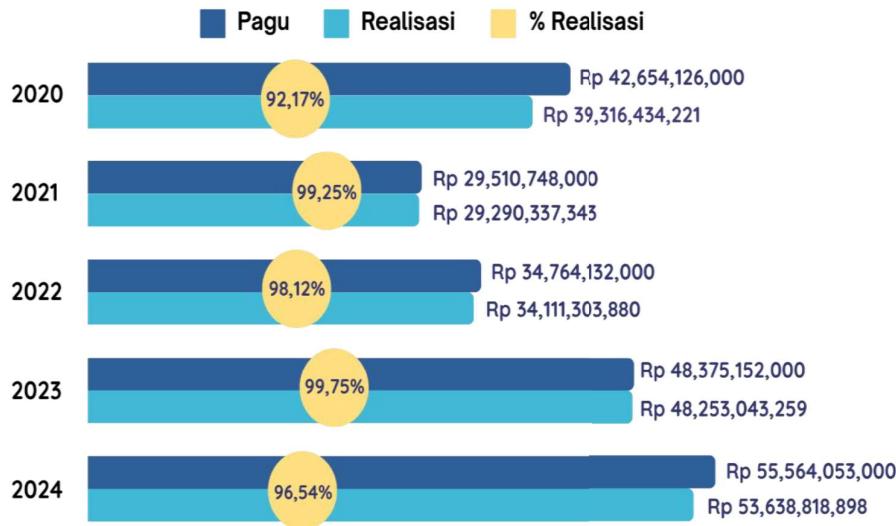


Utara Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Artinya, seluruh kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, meningkat rapor pendidikannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rapor pendidikan yang diterima pada Tahun 2024, merupakan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2023, sedangkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 merupakan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil asesmen nasional tersebut menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara telah berupaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang fokus kepada kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong serta mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan oleh pemda dan satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Tren alokasi anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3 Trend Alokasi dan Realisasai Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2020	42,654,126,000	39,316,434,221	92,17
2021	29,510,748,000	29,290,337,343	99,25
2022	34,764,132,000	34,111,303,880	98,12
2023	48,375,152,000	48,253,043,259	99,75
2024	55,564,053,000	53,638,818,898	96,54

sumber: OM-SPAN Kemenkeu



Gambar 1 Tren Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024

Sumber : *Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dan peningkatan, hal tersebut seiring dengan penurunan dan peningkatan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit Kerja.

### 1.1.2 Tata Kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

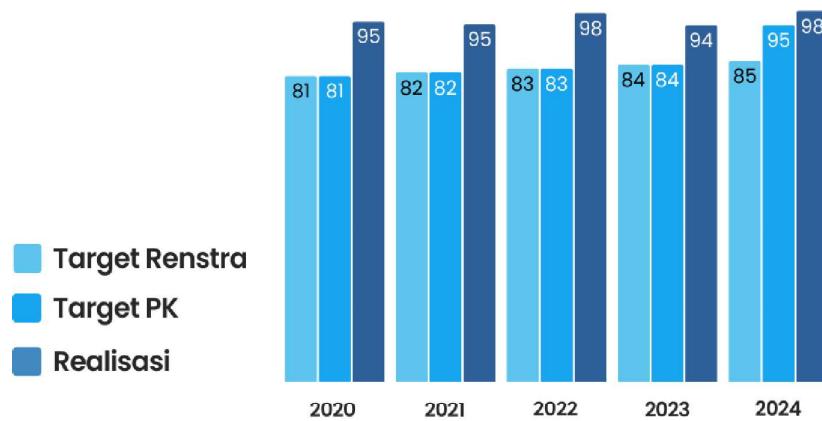
Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. BPMP Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi melalui peningkatan pelaksanaan SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BPMP Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui peningkatan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) selama periode Renstra 2020 - 2024 sebagaimana berikut :



Gambar 2 Tren Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020 - 2021

Sumber : Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Gambar 3 Tren Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2024

Sumber : Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Rata-rata capaian kinerja SAKIP dan NKA BPMP Provinsi Sumatera Utara yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat setiap tahunnya dan sudah tergolong baik, seperti capaian predikat SAKIP meningkat dari BB menjadi A, dan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang selalu melebihi target selama 5 (lima) tahun berturut - turut. BPMP Provinsi Sumatera Utara masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik, dan berkomitmen untuk terus mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja SAKIP dan NKA sebagai bagian dari indikator kinerja Rencana Strategis 2025 - 2029.



### 1.1.3 Inovasi

#### a. SIDaMi (Strategi Implementasi Dasbor, Microsite dan Dummy)

Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan inovasi bernama **“SIDaMi”** yaitu Strategi Implementasi, Dasbor, Microsite dan Dummy terhadap rencana pelaksanaan SPMB di wilayah Provinsi Sumatera Utara. **“SIDaMi”** dilakukan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan SPMB pada tahun 2025 yang lebih baik, khususnya terkait Petunjuk Teknis pelaksanaan SPMB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten dan kota yang mengacu kepada Permendikdasmen No.3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru.

Tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

- **Strategi dan Implementasi** meliputi pembentukan Membentuk Satgas SPMB (Tim Sekretariat dan Wali Wilayah) yang bertugas mempersiapkan, menyosialisasikan dan mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan juga pelaporan. Menyiapkan, **Dasbor, Microsite dan Dummy** perangkat terkait yang mempermudah daerah dalam menyusun Petunjuk Teknis. Menyiapkan dan melakukan Validasi data SPMB. Membantu merespon pertanyaan terkait SPMB. Wali wilayah mengawal penyusunan Juknis SPMB Daerah. Coaching Wali Wilayah dalam pendampingan penyusunan Juknis SPMB Daerah. Responsif terhadap pertanyaan dan kendala-kendala yang dihadapi daerah terkait SPMB. Pimpinan melakukan coacing kepada Tim Satgas (Unsur Sekretariat dan Wali Wilayah) untuk tidak melakukan pemufakatan yang tidak sesuai dengan PERMENDIKDASMEN NO 3 TAHUN 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Melakukan penandatanganan Pakta Integritas melaksanakan Monitoring dan refleksi dan Dokumentasi.
- **Dasbor** SPMB, dibuat untuk membantu pemerintah daerah dan satuan Pendidikan untuk memetakan domisili peserta, menghitung daya tampung dan membantu daerah dalam menyesuaikan daya tampung atau ketersediaan ruang kelas dengan kondisi satuan Pendidikan melalui link Validasi Data SPMB (<https://s.id/vdspmb25>).



- **Microsite** ini sebagai tempat untuk mengumpulkan semua materi, peraturan, data, link dasbor SPMB dan lembar kerja terkait SPMB untuk pemetaan wilayah sebaran sekolah merencanakan daya tampung juga upload dokumen.
- **Dummy**, yakni panduan atau kerangka dalam membuat Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB sebagai model terstandar yang bisa diadopsi oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam menyusun Juknis SPMB Pemda yang selaras dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

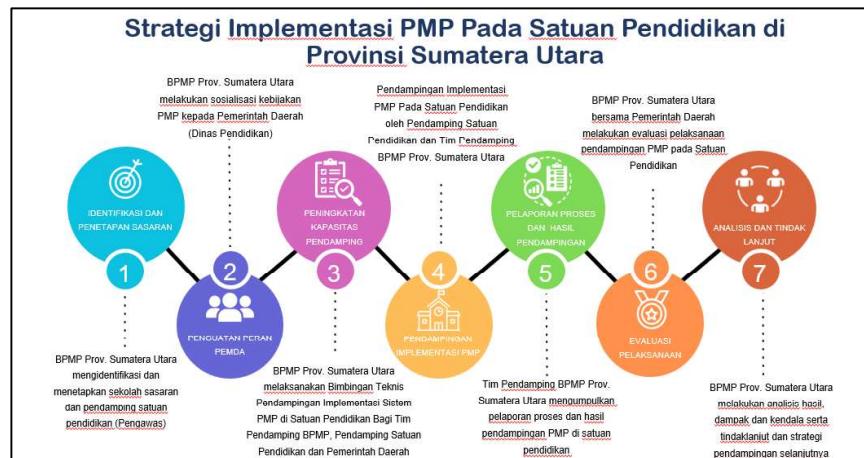
**b. Jadi Bernas (Jangkau Pendidikan Bermutu kian Merata di Sumut)**

Jadi Bernas merupakan inovasi BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mempertajam peran BPMP sebagai mitra pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya diperlukan kolaborasi strategis demi implementasi penjaminan mutu pendidikan antara pemerintah daerah, pendamping satuan pendidikan dengan BPMP melalui kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem PMP di Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan model edukasi, supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (PMP).

Pendampingan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di BPMP, pemerintah daerah dan pendamping satuan pendidikan. Peran strategis ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi PMP pada satuan pendidikan dan melaksanakan pemenuhan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta mendorong terjangkaunya pendidikan bermutu yang kian merata di Sumatera Utara.

Inovasi ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- **Pola dan Strategi Pendampingan Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan**



Gambar 4 Inovasi "Jadi Bernas"

Pola pendampingan ini merupakan pola pendampingan yang melaksanakan beberapa fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yaitu melaksanakan fungsi pemetaan mutu, pelaksanaan supervisi, fasilitasi, kemitraan, pemantauan dan evaluasi.

Inovasi ini sudah diterapkan dan hasilnya antara lain :

- a) Pendampingan implementasi PMP sudah dapat menyentuh 19.086 satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian sebanyak 85,86% satuan pendidikan yang telah mendapatkan regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan;
- b) Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Dengan pola pendampingan ini terdapat 1.800 pendamping yang merupakan unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang telah meningkat kompetensinya dalam implementasi PMP di satuan pendidikan.

- **Dasbor data capaian mutu satuan pendidikan berdasarkan SNP**

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Setditjen PAUD Dasmen telah mengeluarkan dasbor pemantauan implementasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat wilayah dan satuan pendidikan. Dari hasil dasbor ini, untuk melakukan pendampingan hingga tingkat satuan pendidikan di



Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan pengembangan sistem informasi yang menyajikan data peta mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA di Provinsi Sumatera Utara. Sistem informasi pendampingan implementasi PMP ini menyajikan data yang di tampilkan oleh dasbor Tim PMP Setditjen. Sehingga dasbor ini dapat di gunakan oleh seluruh satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

Dasbor ini menyajikan data capaian mutu satuan pendidikan berdasarkan SNP, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Link Dasbor : <https://s.id/pmpsumut25>

- **Microsite Pendampingan Implementasi PMP**

Microsite Pendampingan Implementasi PMP dibuat pada tanggal 7 September 2025 dengan alamat website: <https://s.id/ImplementasiSatpen25>.

Pada microsite ini terdapat link dasbor PMP dan akses rapor pendidikan, Materi Pendampingan PMP, dokumen hasil pendampingan pasca bimtek yang telah dilakukan oleh tim pendamping, serta regulasi turunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Microsite ini masih aktif digunakan dalam proses pendampingan dengan total pengunjung pada tanggal 27 Oktober 2025 sebanyak hingga 70.400 pengunjung.

#### 1.1.4 Penghargaan

- a. Peringkat Kedua Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Semester I Tahun 2024

BPMP Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan dari KPPN Medan I sebagai Peringkat Kedua Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penerbitan Surat Hasil



Rekonsiliasi (SHR) Semester I Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Mitra Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I.



Gambar 5 Penerimaan Penghargaan KPPN Medan I Award sebagai Peringkat II dalam Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyelesaian Rekon dan Penerbitan SHR  
(30/07/2024)



Gambar 6 Piagam Penghargaan KPPN Medan I Award (30 Juli 2024)

- b. Peringkat kedua Pelaporan Capaian Output Aplikasi SAKTI Periode Desember Tahun 2024



BPMP Provinsi Sumatera Utara menerima Peringkat kedua Pelaporan Capaian Output Aplikasi SAKTI Periode Desember Tahun 2024 yang diberikan oleh KPPN Medan I tanggal 14 April 2025.



Gambar 7 Pemberian Penghargaan KPPN I Medan sebagai Peringkat Kedua Pelaporan Capaian Output Aplikasi SAKTI Periode Desember Tahun 2024



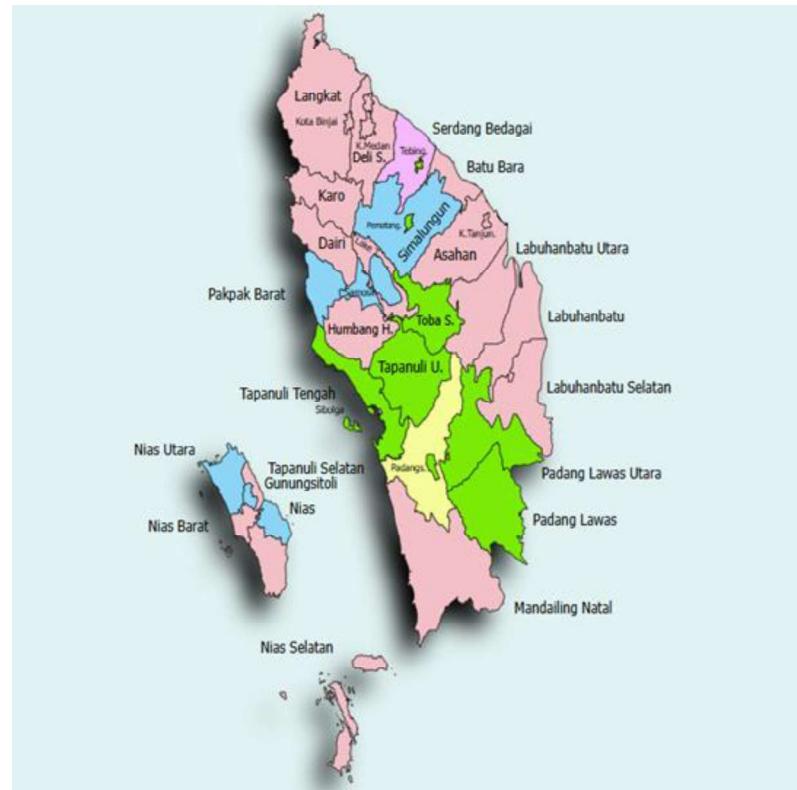
Gambar 8 Piagam Penghargaan KPPN I Medan sebagai Peringkat Kedua Pelaporan Capaian Output Aplikasi SAKTI Periode Desember Tahun 2024



## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Potensi

Untuk mendukung program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. BPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD Dasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat sehingga berpotensi dalam mengawal serta mendukung keterlaksanaan program prioritas tersebut di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 9 Luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara  
Sumber data : Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

**Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara 72.981,23**

**Jumlah wilayah Administrasi**

Kabupaten	: 25
Kota	: 8
Kecamatan	: 456
Kelurahan	: 430
Desa	: 5.683

Penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui berbagai kegiatan advokasi, sosialisasi, pendampingan, monitoring serta menjalin kemitraan dengan Pemda dan Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA di seluruh Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berikut jumlah sekolah yang menjadi potensi dalam pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.



Tabel 4 Data Jumlah Sekolah di Provinsi Sumatera Utara

No.	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
1	Kab. Deli Serdang	611	289	1	6	106	2	976	360	144	130	9	2,634
2	Kota Medan	466	336	0	8	55	1	822	425	222	141	12	2,488
3	Kab. Langkat	294	335	0	132	44	1	671	181	72	73	1	1,804
4	Kab. Simalungun	173	322	0	5	10	1	744	160	46	48	3	1,512
5	Kab. Asahan	160	236	5	11	11	1	454	122	43	40	3	1,086
6	Kab. Serdang Bedagai	229	151	3	38	20	1	448	97	41	37	2	1,067
7	Kab. Nias Selatan	106	209	0	25	14	0	359	144	63	51	0	971
8	Kab. Mandailing Natal	73	185	2	1	5	1	412	86	25	22	2	814
9	Kab. Tapanuli Utara	41	210	1	0	4	0	385	80	25	23	1	770
10	Kab. Labuhanbatu	75	196	9	0	17	1	290	68	35	32	1	724
11	Kab. Batu Bara	163	146	0	30	20	0	247	63	26	25	1	721
12	Kab. Tapanuli Tengah	43	173	1	9	9	1	323	84	25	20	1	689
13	Kab. Karo	103	87	1	0	4	1	287	72	26	12	3	596
14	Kab. Labuhanbatu Utara	96	85	0	7	7	0	294	57	17	22	1	586
15	Kab. Tapanuli Selatan	164	32	0	0	6	1	288	51	12	14	1	569
16	Kab. Dairi	29	135	0	0	2	1	261	61	25	16	1	531
17	Kab. Toba	32	177	0	0	2	1	225	51	18	17	2	525
18	Humbang Hasundutan	25	188	1	0	3	0	216	49	17	13	1	513
19	Kab. Padang Lawas	121	101	4	3	16	0	197	39	10	19	0	510
20	Kab. Labuhanbatu Selatan	109	79	0	0	9	0	208	51	16	26	0	498
21	Kab. Nias Utara	28	167	1	9	19	0	166	57	15	23	0	485
22	Kab. Padang Lawas utara	40	96	0	4	6	1	220	40	11	10	1	429
23	Kota Binjai	83	33	0	6	5	1	172	61	32	24	4	421
24	Kab. Nias	17	100	0	24	16	1	163	53	11	17	0	402



25	Kab. Samosir	18	118	5	0	3	0	195	34	14	5	0	392
26	Kota Pematangsiantar	45	84	2	2	7	1	114	42	26	33	2	358
27	Kab. Nias Barat	100	37	0	4	3	0	108	39	17	13	1	322
28	Kota Gunungsitoli	28	53	0	22	14	1	107	34	11	12	3	285
29	Kota Padang Sidempuan	47	32	9	1	7	1	97	26	19	17	2	258
30	Kota Tebing Tinggi	39	38	0	4	6	0	101	27	14	14	3	246
31	Kota Tanjung Balai	26	54	1	0	13	0	81	22	12	9	1	219
32	Kab. Pakpak Bharat	7	60	1	1	5	1	59	28	5	4	1	172
33	Kota Sibolga	20	41	0	2	2	1	36	16	9	8	1	136
Total		3,611	4,585	47	354	470	22	9,726	2,78	1,104	970	64	23,733

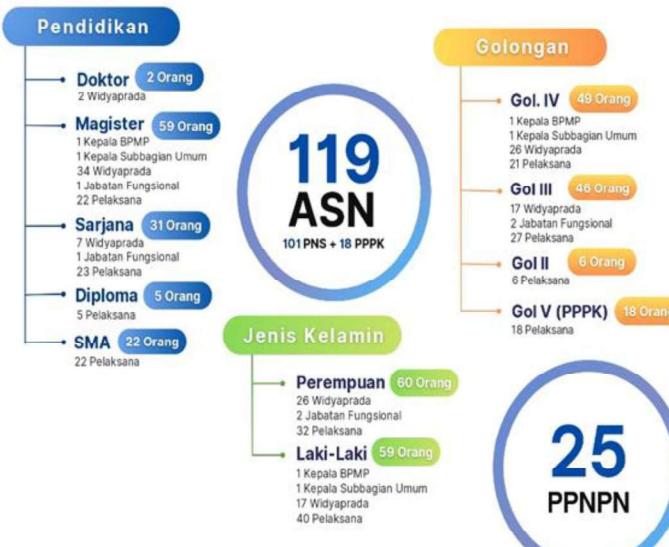
*Sumber data : Dapodik Tahun 2025*

- **Sumber Daya Manusia (SDM) BPMP Provinsi Sumatera Utara.**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu potensi penting dalam mendukung keterlaksanaan program prioritas dan program Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan diperlukan agar SDM yang tersedia dapat memberikan layanan dan manfaat secara optimal kepada masyarakat. Komitmen dan upaya BPMP Provinsi Sumatera Utara salah satunya adalah dengan cara melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan *In House Training (IHT)*, kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai, dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Spesifik Pegawai untuk seluruh ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 101 orang dan PPPK sebanyak 18 orang dengan rincian kualifikasi pendidikan sebagai berikut:



## SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara



### Klasifikasi Jabatan

Kepala	1 Orang
Kepala Subbagian Umum	1 Orang
Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
Penelaah Teknis Kebijakan	14 Orang
Penelaah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	2 Orang
Pengolah Data dan Informasi	27 Orang
Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1 Orang
Teknisir Sarana dan Prasarana	1 Orang
Penata Layanan Kesehatan	1 Orang
Pengadministrasi Perkantoran	17 Orang
Operator Layanan Operasional	9 Orang
Pramu Bakti	1 Orang
Widyapradha Ahli Madya	22 Orang
Widyapradha Ahli Muda	15 Orang
Widyapradha Ahli Pertama	6 Orang

PPNPN Pramubakti 3 orang  
PPNPN Keamanan 20 orang  
PPNPN Pengemudi 2 orang

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025 Per 1 Oktober 2025

Gambar 10 Data Jumlah Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Utara,

Sumber data : Data Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara

per 1 Oktober Tahun 2025

### • Sarana dan Prasarana

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, perpustakaan, ruang laboratorium, ruang aula, ruang kelas, asrama, lapangan olahraga dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, jaringan internet sebagai pendukung teknologi informasi sudah menjangkau seluruh area gedung dalam rangka semakin memperkuat BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan.



**Gambar 11 Ruangan Pelayanan Publik**

### 1.2.2 Permasalahan

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sumatera Utara selama selama 5 (ima) tahun berturut - turut perlahan menunjukkan kenaikan meskipun terdapat beberapa perubahan indikator capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil rapor pendidikan Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2020 - 2025 masih terdapat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan capaian nilai literasi dan numerasi dibawah rata - rata nilai nasional, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- **Partisipasi Pendidikan**

Secara umum angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat dan dapat dipertahankan. Masih terdapat berbagai masalah dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan agar dapat menunjukkan hasil yang baik. Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan angka partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal.



2. Belum meratanya partisipasi pendidikan di berbagai wilayah di provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota.
3. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun.
4. Masih sedikit Satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Dukungan fasilitas pada satuan pendidikan terutama fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

- **Kualitas**

1. Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang literasi membaca dan numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/sederajat.
2. Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang.
3. Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional.
4. Belum optimalnya penanganan satuan pendidikan yang capaian literasi dan numerasinya di bawah standar minimum
5. Masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi.
6. Rendahnya angka satuan PAUD yang memenuhi standar pelaksanaan PAUD HI.
7. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata.
8. Belum optimalnya pemahaman, kemampuan dan kesadaran satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan;
9. Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higiene di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan.



- **Pembiayaan Pendidikan**

Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD sesuai peruntukannya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sebagai berikut:

1. Perbedaan persepsi terkait kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif menyebabkan pemanfaatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran dapat terjadi.
2. Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melakukan pemenuhan saja tanpa memperhatikan ketepatan dari penggunaan anggaran tersebut.



## BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi dan Misi

**Visi BPMP Provinsi Sumatera Utara** sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengembangkan amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka visi BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah :

*“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Sumatera Utara di bawah binaan Ditjen PAUD Dasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Presiden.

**Misi BPMP Provinsi Sumatera Utara** sejalan dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka misi BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.; dan
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.



## 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan

Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

Tabel 5 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1.	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD</li><li>2. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 Tahun</li></ol>
2.	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD.</li><li>2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Literasi Membaca</li><li>b. Numerasi</li></ol></li><li>3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinaaan pada kategori baik</li></ol>
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengaruhutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Pembangunan Kebahasaan</li><li>2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia</li></ol>
4.	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun</li></ol>
5.	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian</li></ol>



Tabel 6 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara

<b>Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Indikator Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara</b>
Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD</li><li>2. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 Tahun</li></ol>
Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD</li><li>2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Literasi Membaca</li><li>b. Numerasi</li></ol></li><li>3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik</li></ol>
Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik</li><li>2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A</li></ol>

### 2.3 Sasaran Kegiatan

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran</li><li>1.2 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan</li></ol>



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik. 2.2.Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan tiga sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara

Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara
Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan.	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan kesetaraan
Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BPMP Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :



Tabel 9 Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara dan Indikasi Risiko

No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara	Indikasi Resiko
1.	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan belum memberikan keberpihakan untuk wilayah wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah, daerah-daerah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak optimal yang menyebabkan fasilitas tidak digunakan dan tidak mendukung perluasan daya tampung.</li><li>2. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalinnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah.</li><li>3. Penerima bantuan pendidikan tidak mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran dan/atau penggunaan yang bisa mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan, serta indeks biaya bantuan yang diberikan tidak dapat menutup opportunity cost yang dibutuhkan.</li><li>4. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak tersedia secara memadai serta masih adanya disparitas antar wilayah.</li><li>5. Belum terdapat fleksibilitas waktu pada proses pembelajaran pendidikan nonformal karena masih mengikuti</li></ol>



No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara	Indikasi Resiko
		<p>waktu pembelajaran pada pendidikan formal.</p> <p>6. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal karena kompetensi guru yang tidak sesuai, kurikulum yang tidak adaptif, serta fasilitas yang tidak sesuai pada layanan pendidikan inklusif.</p>
2.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan kesetaraan	<p>1. Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui teknologi tidak optimal secara baik untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta pengayaan pembelajaran (sumber bahan ajar seperti konten pembelajaran dan bahan bacaan bermutu).</p> <p>2. Tidak terbangunnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).</p> <p>3. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran.</p> <p>4. Penerapan kurikulum belum berpengaruh pada cara belajar mengajar, fasilitasi belajar guru murid, serta pola pembiasaan di lingkungan belajar. Selain itu, kurikulum tidak kontekstual, tidak berpusat pada peserta didik, tidak berfokus pada karakter dan kompetensi esensial, dan tidak sesuai konteks kewilayahan.</p> <p>5. Bahan ajar yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelajaran, baik dari segi jumlah, distribusi ke wilayah yang kekurangan, kesesuaian konten dengan usia dan perkembangan anak, maupun</p>



No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara	Indikasi Resiko
		<p>keterkaitan dengan konteks wilayah. Di samping itu, terbatasnya pengawasan berbagai pihak sehingga terdapat buku dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam proses pembelajaran.</p> <p>6. Lulusan pendidikan nonformal tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal dan kompetensi yang diharapkan karena kualitas layanan pendidikan nonformal yang tidak cukup baik.</p> <p>7. Rendahnya partisipasi peserta didik dalam ajang talenta dan capaian prestasi tingkat internasional menurun.</p> <p>8. Satuan pendidikan pada daerah terpencil belum siap untuk diakreditasi karena berbagai kendala, seperti aksesibilitas yang terbatas.</p> <p>9. Pendidikan dan pelatihan guru tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan kesejahteraan guru tidak diikuti dengan peningkatan kinerja, kompetensi, dan pengembangan keprofesionalan, serta pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi dan merata di setiap wilayah karena kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi, redistribusi, dan pengangkatan guru.</p>
3.	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<p>1. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan</p>



No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara	Indikasi Resiko
		<p>penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya.</p> <p>2. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal.</p> <p>3. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak.</p>



## BAB III :

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,  
KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) yaitu:

*Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.*



Arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Tabel 10 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi



### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PAUD Dasmen.

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD Dasmen dalam upaya mendukung Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. *Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan*
  - a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung, antara lain melalui upaya memberikan keberpihakan pada wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, wilayah afirmasi, serta wilayah dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah, dan dengan memperhatikan data kebutuhan anak usia sekolah dan karakteristik wilayah.
  - b. Pemenuhan dan perbaikan prasarana dan sarana layanan pendidikan, dengan memprioritaskan satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan tinggi, terdampak bencana, pada wilayah afirmasi, dengan mendorong pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dan kebutuhan pembelajaran.
  - c. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
  - d. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
  - e. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) antara lain dengan penguatan pendataan tepat yang dapat mengidentifikasi ATS beserta isu yang dihadapi, pola penjangkauan tepat, pendampingan efektif untuk menumbuhkan minat sekolah pada ATS dan kesadaran akan pendidikan pada orang tua/wali dan masyarakat di lingkungan ATS, dan memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia, minat, dan karakteristik serta kebutuhan spesifik anak.
  - f. Penguatan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya, dan pendampingan pada anak beresiko putus sekolah dengan pendekatan konseling.
  - g. Pengembangan dan penguatan layanan pembelajaran yang sesuai dan fleksibel untuk ATS, terutama terkait dengan isu anak yang bekerja, anak



terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, ataupun terkait isu remaja dalam pernikahan. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.

- h. Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus, dengan memastikan tersedianya layanan pada setiap wilayah, serta peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, untuk memberikan hak pendidikan yang berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.
- i. Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
- j. Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh, untuk dapat menjangkau yang selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan.
- k. Peningkatan parenting, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- l. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
- m. Pemenuhan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

2. *Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah*

- a. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, terutama pada wilayah yang belum terlayani, dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, dan membangun komitmen daerah dalam penyediaan PAUD.
- b. Penguatan program untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
- c. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak yang sedang mengikuti PAUD, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Penyederhanaan perizinan PAUD agar dapat mengakomodir multi layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.



- e. Penguatan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.
  - f. Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
  - g. Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) oleh daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.
3. *Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan*
- a. Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan soft skills masa depan sesuai kebutuhan.
  - b. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
  - c. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
  - d. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
  - e. Peningkatan digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital, dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi.
  - f. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
  - g. Penerapan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
  - h. Penerapan asesmen nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas dan memetakan capaian hasil belajar serta menjadi landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.



- i. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- j. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- k. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
- l. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- m. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan telenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- n. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
- o. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
- p. Pengoptimalan peran relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan pendidikan.
- q. Revitalisasi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk meningkatkan pendidikan gizi serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
- r. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (food waste), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.



- s. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi
- t. Dukungan penerapan kurikulum dan pembelajaran pada program sekolah rakyat.

*4. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan*

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendekatan Biaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

*5. Penguatan pembiayaan dan tata kelola Ditjen PAUD Dasmen.*

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Ditjen PAUD Dasmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara**

Arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara merujuk pada arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD Dasmen dalam upaya mendukung agenda pembangunan pada periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 11 Strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PAUD Dasmen

Arah Kebijakan	Strategi
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang berkeadilan untuk semua.
Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara.
Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Utara.
Penguatan sistem tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya nilai kinerja anggaran dan predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara.

Tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi terkait serta pemerintah daerah dan satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Arah kebijakan, strategi, dan program Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang mendukung strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :



- Satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memenuhi SPM pendidikan

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) terhadap pendekatan dan inovasi dalam pembelajaran dan penilaian, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan, program, dan praktik pembelajaran serta penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Koding, dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI).
- Pembinaan Transfer Daerah untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan program - program pusat di satuan pendidikan dan pemda terkait.
- Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan melaksanakan program-program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melaksanakan supervisi Implementasi Sistem (PMP) dan edukasi penggunaan SNP di Satuan Pendidikan.
- Pembinaan Kemitraan untuk membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pusat di daerah
- Pembinaan Digitalisasi Sekolah untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan rumah pendidikan, pengembangan konten pembelajaran dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran, serta memastikan pemanfaatan bantuan digitalisasi dilakukan secara tepat.
- Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pemantauan pelaksanaan program MBG di daerah.



- Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan pemerintah daerah.
2. Tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik; dan
- Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BPMP Provinsi Sumatera Utara yang berbasis mekanisme manajemen talenta; dan
- Melakukan inovasi – inovasi dalam meningkatkan layanan internal dan eksternal BPMP Provinsi Sumatera Utara.

### 3.4 Kerangka Regulasi

BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpijakan pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui **struktur** organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

#### Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu



Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**Tugas**

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

**Fungsi**

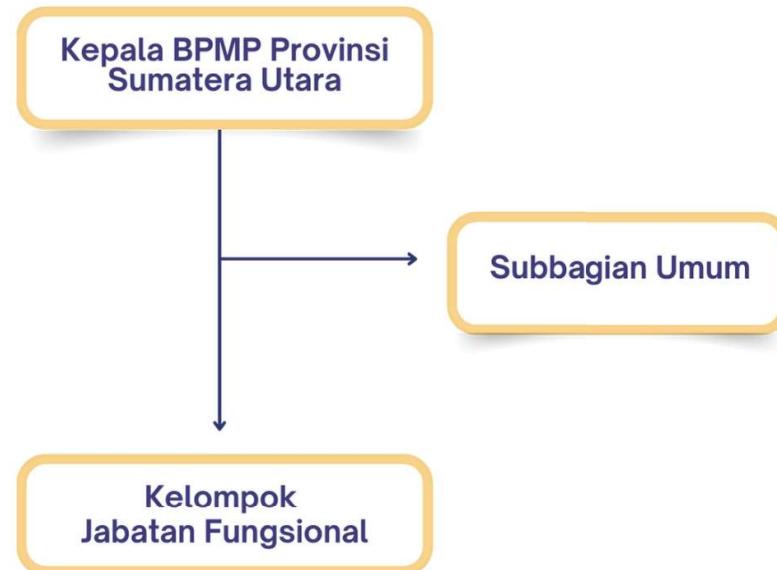
1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

**3.5.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.



## Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara



Gambar 12 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara

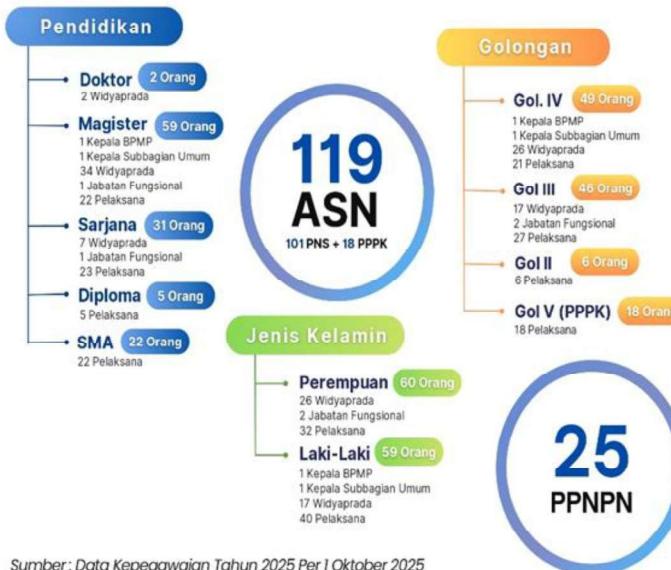
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.5.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



## SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara



### Klasifikasi Jabatan

Kepala	1 Orang
Kepala Subbagian Umum	1 Orang
Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
Penelaah Teknis Kebijakan	14 Orang
Penelaah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	2 Orang
Pengolah Data dan Informasi	27 Orang
Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1 Orang
Teknisir Sarana dan Prasarana	1 Orang
Penata Layanan Kesehatan	1 Orang
Pengadministrasi Perkantoran	17 Orang
Operator Layanan Operasional	9 Orang
Pramu Bakti	1 Orang
Widyapradha Ahli Madya	22 Orang
Widyapradha Ahli Muda	15 Orang
Widyapradha Ahli Pertama	6 Orang

PPNPN Pramubakti 3 orang  
PPNPN Keamanan 20 orang  
PPNPN Pengemudi 2 orang

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025 Per 1 Oktober 2025

Gambar 13 Data Jumlah Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Utara,

Sumber data : Data Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara

per 1 Oktober Tahun 2025



## BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMP Provinsi Sumatera Utara serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

**Tabel 12 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
BPMP Provinsi Sumatera Utara

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Percentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34
IKK 1.2	Percentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61
SK.2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik				
IKK 2.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP	Predikat	A	A	A	A	A



Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Provinsi Sumatera Utara minimal A						

Untuk mencapai target kinerja tersebut maka program dan kegiatan yang disusun dalam mendukung capaian Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Program dan Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan	RO/Komponen
<b>Dukungan pada Tim Percepatan Program Prioritas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>TP1-Revitalisasi Sekolah</li><li>TP2-Digitalisasi Pembelajaran</li><li>TP3-Sistem Penerimaan Murid Baru</li><li>TP4-Wajib Belajar 13 Tahun</li><li>TP5-Penguatan Pendidikan Karakter</li><li>TP6-Makan Bergizi Gratis</li><li>TP7-Pembelajaran dan Penilaian</li><li>TP8-Penjaminan Mutu Pendidikan</li></ul>	<b>RO.750.Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>091-Pelaksanaan Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian</li><li>092-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah</li><li>093-Pelaksanaan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan</li><li>094-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan</li><li>096-Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter</li><li>097-Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah</li></ul>
<b>Non Program Prioritas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Kualitas Transfer daerah</li><li>Peningkatan Kualitas Dapodik</li><li>Tanggap Darurat Bencana</li></ul>	<b>RO.750. Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>092-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah</li><li>094-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan</li></ul>
<b>Pencapaian Target RPJMN/Renstra</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan</li><li>Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan</li><li>Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Pendidikan</li></ul>	<b>RO.751. Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>091-Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan</li><li>092-Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan</li></ul>



Kegiatan	RO/Komponen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 093-Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Pendidikan</li></ul>
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara</li><li>• Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara.</li></ul>	<b>KRO - Layanan Dukungan Manajemen Internal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• RO. EBA.956 Layanan BMN</li><li>• RO. EBA.962 Layanan Umum</li><li>• RO. EBA.994 Layanan Perkantoran</li></ul>

### Tujuan Program/Kegiatan

1. Terlaksananya pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
2. Terlaksananya pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
3. Terlaksananya supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah; dan
7. Terlaksananya urusan administrasi BB/BPMP Provinsi Sumatera Utara.

### Indikasi Highlight Intervensi

BPMP Provinsi Sumatera Utara mengawal dan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Ditjen PAUD Dasmen :



1. Terlaksananya Program Revitalisasi Sekolah di Provinsi Sumatera Utara
2. Terlaksananya Program Digitalisasi Pembelajaran di Provinsi Sumatera Utara
3. Terlaksananya Program Sistem Penerimaan Murid Baru di Provinsi Sumatera Utara
4. Terlaksananya Program Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi Sumatera Utara
5. Terlaksananya Program Penguatan Pendidikan Karakter di Provinsi Sumatera Utara
6. Terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Sumatera Utara
7. Terlaksananya Program Pembelajaran dan Penilaian di Provinsi Sumatera Utara
8. Terlaksananya Program Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

#### Indikator dan Rincian Output

Tabel 14 Indikator dan Rincian Output

IKP/IKK/RO	Nomenklatur
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
IKK 1.1	Percentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
RO 750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya
IKK 1.2	Percentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
RO 751	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan
SK 2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A
RO 956	Layanan BMN
RO 962	Layanan Umum



IKP/IKK/RO	Nomenklatur
RO 994	Layanan Perkantoran

### Lokasi

- Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan SMA di Provinsi Sumatera Utara.
- Pemda/Dinas Pendidikan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

### Bagian/Tim Kerja Pelaksana

Seluruh tenaga struktural, tenaga pelaksana, tenaga fungsional, dan staf PPPK di BPMP Provinsi Sumatera Utara berbagi peran dalam upaya pencapaian target kinerja melalui unit kerja yang terdiri dari :

- Sub Bagian Umum
- Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan
- Tim Kerja SD
- Tim Kerja SMP
- Tim Kerja SMA
- Tim Kerja Program Prioritas.

### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :



Tabel 15 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Sumatera Utara 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	23.313.373.000	25.204.093.000	26.204.093.000	26.725.225.000	27.900.995.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	26.941.564.000	28.326.115.000	33.225.115.000	33.650.556.000	34.107.600.000



## BAB V: PENUTUP



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 – 2029.

Dalam Renstra diuraikan secara sistematis tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara pada pencapaian visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2025 - 2029. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari klasifikasi rincian output sebagai berikut :

1. Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya;
2. Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan;
3. Layanan BMN;
4. Layanan Umum;
5. Layanan Perkantoran.

Dengan adanya Renstra ini, seluruh kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat terarah dan terencana dalam mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan, tata kelola dan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan serta untuk memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan Sumatera Utara selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Ditjen PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.